

PERSETUJUAN – INISIATIF – BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN
2026

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA NO. 11, 3 HLM.

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA TENTANG TENTANG PERSETUJUAN USULAN INISIATIF KOMISI I DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN MENJADI INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

- ABSTRAK : - bahwa mendapatkan bantuan hukum merupakan hak dasar bagi masyarakat yang harus diberikan oleh Daerah khususnya bagi masyarakat miskin, sehingga Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum sehingga perlu diubah dimana sesuai Pasal 7 ayat (7) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta menyatakan bahwa “Keputusan rapat paripurna atas usulan rancangan Perda berupa: a. Persetujuan; b. Persetujuan dengan perubahan; atau c. penolakan sehingga perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Usulan Inisiatif Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin menjadi Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2018; Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini berisikan tentang Persetujuan Usulan Inisiatif Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin⁹⁸⁴ menjadi Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 1 Juli 2026.